



IRFAN FADHIL/RADAR SULBAR

DESAK. Warga mendesak Dinas ESDM Sulbar, mencabut IUP PT Polemaju Mineral Mandiri yang bakal beroperasi di Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, di Desa Kabuloang Kecamatan Kalukku, Kamis 3 Oktober 2024.

Penataan WIUP Belum Maksimal

MAMUJU, RADAR SULBAR -- PT. Polemaju Mineral Mandiri diduga telah melakukan pencatutan lahan tanpa kesepakatan dengan warga. Warga mendesak, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Perusahaan tersebut dicabut.

Atas tuntutan tersebut, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sulbar, meninjau lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Polemaju Mineral Mandiri, di Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kamis 3 Oktober.

Pendamping hukum warga, Imanuddin, menilai pemetaan lokasi WIUP oleh Dinas ESDM Sulbar, belum maksimal. Pihak ESDM Sulbar bahkan meminta bantuan warga setempat untuk mengambil batas-batas titik koordinat WIUP tersebut.

Imanuddin menilai pihak perusahaan tidak serius menyelesaikan persoalan dengan warga, lantaran hanya diwakili oleh masyarakat setempat yang bukan bagian dari pengambil keputusan.

"Sangat disayangkan pihak perusahaan tidak menghadirkan direktur, komisaris maupun konsultan. Itu merugikan klien kami," kata Imanuddin, saat dikonfirmasi, Minggu 6 Oktober.

Imanuddin menegaskan, jika pihak ESDM Sulbar tidak segera memenuhi tuntutan warga, pihaknya bakal menempuh upaya hukum. "Langkah awal kami mendesak Dinas ESDM turun melakukan pemetaan kembali," katanya. Kepala Bidang (Kabid) Minerba Dinas ESDM Sulbar, Ilham mengatakan, kehadirannya di Desa Kabuloang un-

tuk menanggapi tuntutan warga terkait dugaan klaim sepihak PT. Polemaju Mineral Mandiri.

Namun Ilham mengaku tidak tahu solusi atas perselisihan lahan tersebut. Dia berdalih, pihaknya hanya menetapkan wilayah sesuai dokumen lahan terkait. "Solusinya bergantung kesepakatan masyarakat dan perusahaan," sebutnya. Untuk diketahui, peninjauan yang dilakukan Dinas ESDM Sulbar, Kamis 3 Oktober, merupakan tindak lanjut hasil musyawarah antar warga Desa Kabuloang bersama pendamping hukum dan pihak Perusahaan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Sulbar dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sulbar. (irf/jsm)